



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAS MASRIAH
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 500784

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.963.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/90 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 550 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. Tanah Seluas 616 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 308.000.000
4. Tanah Seluas 810 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/226 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **379.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



3. MOTOR, N MAX YAMAHA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000

4. MOTOR, YAHAMA MIO SOUL 2SX Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

5. MOBIL, TOYOTA RAISE A250RA-GBVVJ 1.0T S CVT TSS Tahun
2021, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 187.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.489.540

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.579.489.540

III. HUTANG Rp. 852.518.166

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.726.971.374

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.